

**LAPORAN KINERJA
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2025**



**BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT JENDRAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	0
RINGKASAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	5
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Potensi.....	12
F. Permasalahan dan Tantangan	13
G. Sostematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029.....	16
B. Rencana Kerja Tahun 2024.....	18
C. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Kinerja Anggaran	26
C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai <i>Feedback</i> Perencanaan Tahun 2025.....	26
D. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024	44
BAB IV PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA	45
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim Kerja Biro Umum dan PBJ.....	5
Tabel 2. Rincian Output Biro Umum dan PBJ.....	15
Tabel 3. Capaian Kinerja Biro Umum dan PBJ.....	19
Tabel 4. Target dan realisasi IKU Tingkat Digitalisasi Arsip.....	22
Tabel 5. Target dan realisasi IKU ITKP.....	23
Tabel 6. Target dan realisasi IKU e-Tendering.....	24
Tabel 7. Target dan realisasi IKU Layanan Pimpinan.....	27
Tabel 8. Target dan realisasi IKU Layanan Kerumahtanggaan.....	29
Tabel 9. Target dan realisasi IKU Tindaklanjut Rekomendasi Itjen.....	31
Tabel 10. Target dan realisasi IKU Tindaklanjut Temuan BPK.....	33
Tabel 11. Target dan realisasi IKU PM SAKIP Biro Umum dan PBJ.....	35
Tabel 12. Target dan realisasi IKU IP ASN Biro Umum dan PBJ.....	37
Tabel 11. Target dan realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar.....	38
Tabel 11. Target dan realisasi IKU IKPA Satker Biro Umum dan PBJ.....	39
Tabel 11. Target dan realisasi IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024.....	19
Gambar 2. Nilai ITKP Nasional.....	23
Gambar 3. Nilai e-Tendering Nasional.....	25
Gambar 4. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2024.....	44
Gambar 5. Penghargaan dari Asian Development Bank.....	44
Gambar 6. Akreditasi Klinik Pratama KKP.....	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 memuat pertanggungjawaban kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu kepada Peraturan MenPan-RB No 53 Tahun 2014.

Selama periode Tahun Anggaran 2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan fasilitatif dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak terkait dalam upaya menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Selain itu, Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan, serta berbagai kebijakan yang ditetapkan.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan kinerja ini. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 16 Januari 2025
Plt. Kepala Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

RINGKASAN

Laporan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan Biro Umum dan PBJ yang dilaksanakan di tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 yaitu "*Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan*", telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024. Mengingat perubahan berkelanjutan atas target dan kinerja selalu dilakukan dalam periode satu tahun, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dari organisasi melalui proses penyesuaian Perjanjian Kinerja Organisasi, maka kenaikan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan keselarasannya. Fluktuasi NKO hanya merepresentasikan hasil evaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu mencapai ekspektasi target yang semakin menantang serta bagaimana cara mencapainya. Dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa Biro Umum dan PBJ mampu mengikuti perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada bagian akhir dari Laporan Kinerja ini disajikan daftar penghargaan/*achievement* di Lingkup Biro Umum dan PBJ sepanjang tahun 2024.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada tahun 2024, capaian nilai kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa adalah 107,37% dengan kategori baik, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 106,03%. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.



CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA 2024

NILAI KERJA ORGANISASI
107,37



TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN PBJ

INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN KERUMAH TANGGAAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
85	93,62	110

NILAI REALISASI PAGU PAKET YANG DILAKUKAN TENDER DIBANDINGKAN TOTAL PAGU PAKET YANG DIUMUMKAN DALAM RUP (NILAI)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	5	100

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (INDEKS)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	85,1	106

PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PIMPINAN (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
88	92,87	106

TINGKAT DIGITALISASI ARSIP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
81	88,69	109

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BIRO UMUM DAN PBJ

PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	100	100

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) BIRO UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
71	86,18	120

REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
81	100	120

UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP BIRO UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
94	130	120

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BIRO UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (NILAI)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
93,76	90,99	120

NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP BIRO UMUM DAN PBJ

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
84	85,5	102

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA (%)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
85	87,83	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi pemerintah berkewajiban menjalankan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) sehingga akan menghasilkan *good government* dan *clean government*. Tercapainya tata pemerintahan yang baik tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pelayanannya yang memenuhi prinsip-prinsip: akuntabilitas, efisien dan efektif, transparansi, partisipasi, keadilan dan penegakkan aturan. Hal tersebut akan tercapai jika terjadi perubahan *mindset* (cara berpikir) dan *cultureset* (budaya kerja) melalui upaya pengembangan unit kerja yang mencerminkan nilai-nilai *good governance*. Hal tersebut selaras dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu menciptakan pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan prima, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan serta pemantauan terhadap keberhasilan/kegagalan yang telah ditetapkan, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang tak kalah penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Interpretasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan

Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan demi kemajuan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat. Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwajibkan mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa berperan dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP. Keberhasilan kinerja Biro Umum dan PBJ dalam melaksanakan peran tersebut diukur berdasarkan capaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi perencanaan strategis, serta perumusan indikator kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 sebagai sarana untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan menggambarkan hasil pengukuran kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selama kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja (LKj) ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain menggambarkan hasil pengukuran kinerja pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2024, Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 juga disusun sebagai salah satu bentuk media pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan.

C. Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan urusan angkutan pegawai, serta keamanan kantor pusat;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta persandian;
- c. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- e. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran;
- f. koordinasi dan pengelolaan layanan dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

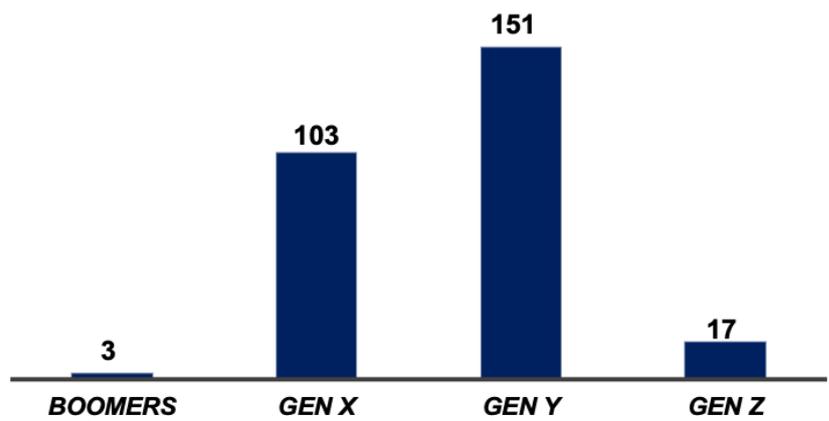
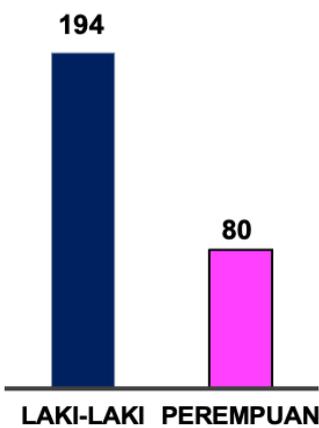
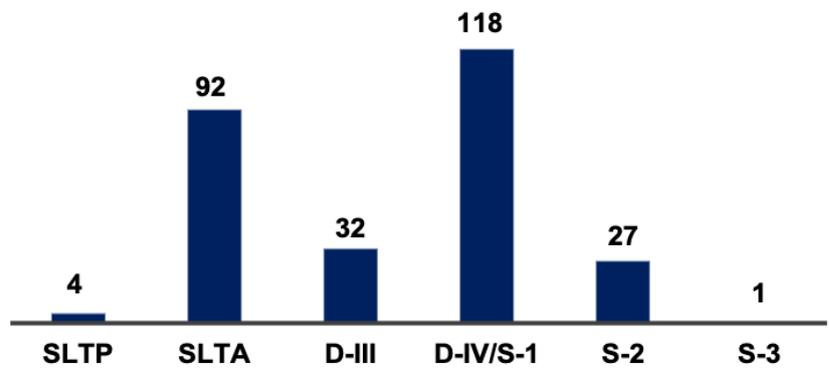
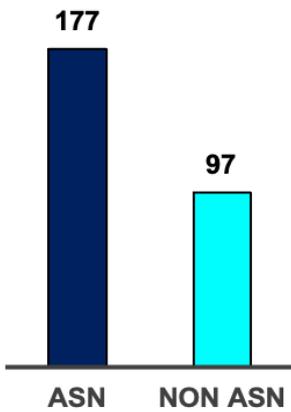
D. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 274 Pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari ASN (177 Pegawai) dan Non ASN (97 Pegawai) yang tersebar berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan, jenis kelamin, serta generasi sebagaimana digambarkan berikut ini:



Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari sumberdaya manusia yang heterogen, baik dari sisi status pegawai, jenis kelamin, jenjang pendidikan, hingga generasi usia.

SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA



“Human capital development memiliki peran penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Biro Umum dan PBJ berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya pengembangan pegawai.”

Dalam rangka memudahkan penyelenggaraan layanan, pegawai tersebut terbagi ke dalam 5 (lima) tim kerja dengan penjabaran sebagai berikut:

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
1.	Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat	a. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, serta tindak lanjut pengaduan terkait layanan kerumahtanggaan kantor pusat KKP b. Pengelolaan lapangan olahraga, ruang musik, serta klinik pratama KKP c. Pemeliharaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Jenderal KKP d. Pengelolaan angkutan pegawai kantor pusat KKP e. Pengelolaan keamanan kantor pusat KKP f. Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pusat KKP g. Koordinasi dan pengelolaan perlengkapan lingkup Satker Biro Umum dan PBJ
		2. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan PBJ	Penyelesaian tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		3. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum	Penyelesaian tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
		dan Pengadaan Barang/Jasa	
		4. Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Biro Umum dan PBJ meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai
		5. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan kinerja lingkup Biro Umum dan PBJ meliputi perencanaan, pemantauan, pengukuran, serta verifikasi hasil capaian
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian nilai IKPA lingkup Satker Biro Umum dan PBJ meliputi revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output
		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum dan PBJ	a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja lingkup Satker Biro Umum dan PBJ b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan nilai kinerja anggaran lingkup Satker Biro Umum dan PBJ
		8. Direktif Pimpinan	a. Pengelolaan Taman Anak Sejahtera (TAS) KKP

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
			b. Pelaksanaan upaya penghematan energi lingkup kantor pusat KKP c. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Umum dan PBJ
2.	Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	1. Persentase pelaksanaan layanan pimpinan	a. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, Asisten Khusus dan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan b. Pelaksanaan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, Asisten Khusus dan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan
		2. Unit kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	a. Pemantauan dan evaluasi keaktifan pegawai Biro Umum dan PBJ dalam aplikasi bitrix b. Pemenuhan dokumen kinerja yang menjadi komponen penilaian dalam penerapan system manajemen pengetahuan yang terstandar
		3. Direktif Pimpinan	Pelaksanaan layanan tugas Sekretaris Jenderal
3.		1. Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	a. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan tugas terkait penerimaan, pencatatan,

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
	Persuratan dan Kearsipan	2. Direktif Pimpinan	<p>pensortiran, serta ekspedisi surat lingkup kantor pusat KKP</p> <p>b. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis KKP</p> <p>c. Pengembangan dan bimbingan teknis persuratan dan kearsipan serta pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan KKP</p> <p>Penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan persuratan dan kearsipan KKP</p>
4.	Layanan Pengadaan	1. Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan pagu paket yang diumumkan dalam RUP	<p>a. Penyiapan bahan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa</p> <p>b. Penyiapan bahan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Penyiapan bahan konsolidasi pengadaan barang/jasa dengan unit kerja di lingkungan</p> <p>d. Penyiapan bahan dokumen pelelangan barang/jasa</p> <p>e. Pelaksanaan koordinasi kontrak pengadaan barang/jasa</p> <p>f. Pelaksanaan pelelangan barang/jasa</p>

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
			g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
		2. Direktif Pimpinan	Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa
5.	Dukungan Layanan Pengadaan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	<p>a. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa lingkup KKP</p> <p>b. Penyiapan bahan verifikasi dan <i>helpdesk</i> Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</p> <p>c. Penyiapan bahan standarisasi LPSE dan SOP pengadaan barang/jasa</p> <p>d. Penyiapan bahan penyusunan katalog elektronik</p> <p>e. Penyediaan data pengadaan barang/jasa</p> <p>f. Penyiapan bahan konsultasi serta pengelolaan pengaduan dan sanggah</p> <p>g. Penyiapan bahan tingkat kematangan organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)</p> <p>h. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis layanan pengadaan</p>

NO	TIM KERJA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN FUNGSI
			barang/jasa dan penyusunan kontrak i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa j. Penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKP k. Fasilitasi penyelenggaraan P3DN KKP
		2. Nilai reformasi birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Pemenuhan data dukung dalam penilaian reformasi birokrasi KKP terkait pengadaan barang/jasa meliputi pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan UKPBJ
		3. Direktif Pimpinan	Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa

E. Potensi

Dalam implementasi efisiensi energi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan PBJ menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengintegrasikan sistem manajemen energi yang baru dengan infrastruktur yang sudah ada. Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Biro

Umum dan PBJ, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Biro Umum dan PBJ antara lain:

1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro Umum dan PBJ dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Sumber Daya Manusia baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Umum dan PBJ;
3. Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai;
4. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan di KKP;
5. Sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;
6. Pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan akuntabel.
7. Informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

F. Permasalahan dan Tantangan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP tahun 2020-2024, Sekretariat Jenderal akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan amanat kepada setiap K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di Lingkungan KKP. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Biro Umum dan PBJ masih terdapat tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Belum seluruh pegawai berkompeten mengenai digitalisasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karena SDM yang sangat heterogen dilihat dari jenjang pendidikan;
2. Masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Biro Umum dan PBJ yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis;
3. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 menginformasikan capaian kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selama Tahun 2024. Capaian kinerja dilihat dari penetapan kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dicapai dalam satu tahun.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya (dapat dilihat di SPAN / PMK 249)
- Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran:

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024

Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Renstra Setjen) KKP 2020-2024 dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Renstra Sekretariat Jenderal memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit organisasi eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Karakteristik tujuantersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Waktu pencapaiannya dalam jangka menengah;
2. Proses perumusan dilakukan secara jelas;
3. Proses perumusan telah mempertimbangkan faktor internal;
4. Proses perumusan telah mempertimbangkan faktor eksternal;
5. Perumusan tujuan terkait dengan misi yang telah ditetapkan;
6. Perumusan tujuan telah mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi;
7. Perumusan tujuan telah mempertimbangkan *critical success factors*;
8. Tidak bertentangan dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tujuan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kerumahtanggaan kantor pusat;
2. Pengelolaan Barang Milik Negara yang akuntabel;
3. Peningkatkan pelayanan pimpinan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas; dan
4. Pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efisien dan efektif.

Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran, karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka apabila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Rencana kerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 direpresentasikan pada KRO/RO sebagai berikut:

KRO/RO	URAIAN	ANGGARAN
2328.CAN.001.051	Alat Pengolah Data Biro SDMAO	2,149,214,000
2328.CAN.001.052	Alat Pengolah Data Biro HKLN	264,870,000
2328.CAN.001.053	Alat Pengolah Data Pusdatin	288,000,000
2328.CAN.001.054	Alat Pengolah Data Biro Hukum	300,000,000
2328.CAN.001.055	Alat Pengolah Data Biro Umum dan PBJ	1,400,000,000
2328.CAN.001.056	Alat Pengolah Data Biro Keuangan	357,000,000
2328.CAN.001.057	Alat Pengolah Data Biro Perencanaan	400,000,000
2328.EBA.959	Layanan Protokoler	30,123,778,000
2328.EBA.962.057	Layanan Rumah Tangga	2,302,331,000
2328.EBA.962.058	Layanan Perlengkapan	3,253,404,000
2328.EBA.962.059	Layanan Penatausahaan Biro	8,121,236,000
2328.EBA.962.060	Layanan Pengadaan Bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal dan PT	2,494,078,000
2328.EBA.962.061	Layanan Pengadaan Bidang PRL, PB dan PSDKP	2,034,102,000
2328.EBA.962.062	Layanan Pengadaan Bidang PDSPKP, RSDM dan KIPM	2,034,102,000
2328.EBA.962.063	Layanan Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Katalog	2,404,251,000
2328.EBA.962.064	Layanan Kelembagaan dan Pengembangan SDM PBJ	2,387,750,000

2328.EBA.962.065	Layanan Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi	858,000,000
2328.EBA.962.066	Layanan Persuratan dan Kearsipan	4,509,049,000
2328.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	88,672,785,000
2328.EBA.994.002.A	Operasional Menteri	1,440,000,000
2328.EBA.994.002.B	Sewa Kendaraan Pimpinan	3,936,960,000
2328.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Kantor Lainnya	1,440,000,000
2328.EBA.994.002.D	Langganan Daya Jasa dan Perlengkapan Sarana/Prasarana Gedung	23,494,311,000
2328.EBA.994.002.E	Pemeliharaan Gedung dan Utility Kantor Pusat	83,459,754,000
2328.EBA.994.002.F	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Dalam	15,492,105,000
2328.EBA.994.002.H	Administrasi Perkantoran dan Satker BUPBJ	1,947,620,000
2328.EBA.994.002.I	Pencetakan dan Pengiriman Pos Dinas	1,118,295,000
2328.EBB.951.051	Kendaraan Bermotor Lingkup Setjen	75,000,000
2328.EBB.951.052	Meubelair Lingkup Setjen	5,728,190,000
2328.EBB.951.053.A	Sarana Peralatan Kantor	10,742,251,000
2328.EBB.951.053.C	Modal Lainnya Biro Hukum	200,000,000
2328.EBB.951.053.D	Modal Lainnya Biro Perencanaan	27,000,000
2328.EBB.951.053.E	Modal Lainnya Biro Humas dan KLN	180,000,000
2328.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	11,709,949,000

C. Pemanfaatan informasi Kinerja Tahun 2023 sebagai *Feedback* Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Salah satu dasar penetapan target indikator kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024 adalah hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023. Hal tersebut merepresentasikan bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai *feedback* perencanaan kinerja tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini:

SASARAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		KETERANGAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1,23	1,31			Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 845/SJ.1/TU.140/X/ 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator dan Target Indikator Manajerial tahun 2023 dan 2024, maka Indikator Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro/Pusat lingkup Setjen dihapus
	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	80	87,62	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	81	Target meningkat
	Indeks Tata Kelola Pengadaan KKP	79	86,44	Indeks Tata Kelola Pengadaan KKP	80	Target meningkat
	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	5	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	Target tetap, sudah maksimum.
	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan	87	88,73	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan	88	Target meningkat
	Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat	84	88,83	Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat	85	Target meningkat
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	75	100	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	80	Target meningkat
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	100	100	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	100	Target tetap, sudah maksimum.
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ	80,5	80,30	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ	84	Target meningkat
	Indeks profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	79	86,87	Indeks profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	85	Target meningkat
	Unit Kerja Biro Umum dan PBJ yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92	133,33	Unit Kerja Biro Umum dan PBJ yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	94	Target meningkat
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan	93,75	90,94	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan	93,76	Target meningkat

	Pengadaan Barang/Jasa			Pengadaan Barang/Jasa		
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan PBJ	86	83,94	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan PBJ	86	Indikator dan target berubah pada Bulan Oktober Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa salah satu dasar penetapan target indikator kinerja adalah hasil evaluasi tahun sebelumnya. Merujuk pada Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 845/SJ.1/TU.140/X/2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator dan Target Indikator Manajerial tahun 2023 dan 2024, disebutkan bahwa Indikator Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro/Pusat lingkup Setjen dihapus pada tahun 2024. Selain indikator tersebut, secara keseluruhan target indikator kinerja Biro Umum dan PBJ mengalami peningkatan. Adapun indikator kinerja yang memiliki target tetap merupakan indikator dengan target nilai maksimal yang dapat dicapai. Selanjutnya, pada Oktober 2024 dilakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal. Salah satu perubahan pada Biro Umum dan PBJ adalah indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang berubah menjadi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). Kedua itu tersebut merupakan indikator yang berbeda dengan manual indikator yang berbeda pula. Adapun target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2024 adalah 71 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP Tahun 2024.

D. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025

Dalam menetapkan target, Biro Umum dan PBJ berkomitmen menjaga keselarasan antara Renstra Setjen Tahun 2020-2024, Renja KKP Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja di Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 mengalami penyesuaian pada Oktober 2024. Proses penetapan target kinerja Tahun 2024 Biro Umum dan PBJ mencakup:

- a. Dialog Kinerja Organisasi Lingkup Biro Umum dan PBJ
- b. Pengesahan Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024
Tanggal 25 Januari 2024
- c. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024
- d. Pengesahan Revisi Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024
Tanggal 23 Oktober 2024

BAB III

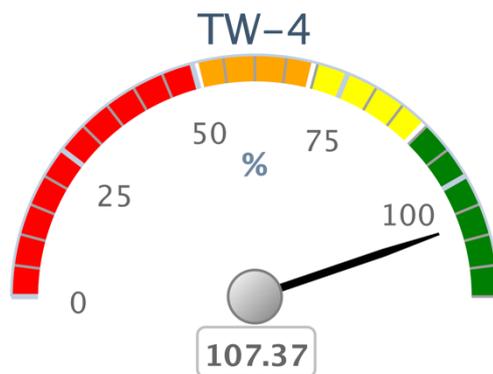
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. Metode dalam mengukur yang dilaksanakan evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan *Balance Score Card (BSC)*, antara lain: Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024, Sasaran Strategis, indikator Kinerja Utama, dan Pengukuran Kinerja. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun pengertian *Balance Score Card (BSC)* adalah alat manajemen kinerja (*Performance Management Tool*) yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan nonfinansial yang kesemuanya terjadi dalam hubungan sebab akibat.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini, capaian kinerja Biro Umum dan PBJ pada Tahun 2024 telah dilakukan efisiensi anggaran melalui optimalisasi sarana dan prasarana kantor pusat KKP seperti ruang rapat, serta digitalisasi proses bisnis dalam penyelesaian tugas. Adapun capaian sasaran strategi pada peta strategi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Biro Umum dan PBJ disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Organisasi Biro Umum dan PBJ

Tahun	NKO	Jumlah Indikator Kinerja
2020	102,92	14
2021	105,97	14
2022	105,92	16
2023	106,03	13
2024	107,37	12

Kegiatan di Biro Umum dan PBJ pada tahun anggaran 2024 adalah pengelolaan komunikasi, informasi publik dan umum. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)	81	81	88,69	109,49
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan KKP (Indeks)	80	80	85,10	106,38
		3	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (Nilai)	5	5	5	100,00

	Ketatausahaan Pimpinan	4	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan (persen)	88	88	92,87	105,53
		5	Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan kantor pusat (persen)	85	85	93,62	110,14
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	80	80	100	120,00
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100,00
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ (Nilai)	84	84	85,80	102,14
		9	IP ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	85	85	87,83	103,33
		10	Persentase Unit Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	93,76	93,76	90,99	97,05
		12	Nilai Kinerja Aperencanaan nggaran (NKA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	71	71	86,18	120,00

B. Kinerja Anggaran

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam lingkup KKP.

Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum. Kegiatan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) output sebagai berikut:

- Alat Pengolah Data dan Komunikasi
- Layanan Perkantoran;
- Layanan Umum;
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dan
- Layanan protokoler.

Untuk mencapai output dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel 1 di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 332,849,012,000,-. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024.

C. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai *Feedback* Perencanaan Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1) Tingkat Digitalisasi Arsip KKP

Tingkat digitalisasi arsip merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi yang dipergunakan dalam mengukur tingkat pengelolaan arsip secara digital pada K/L/D. Dewasa ini, perkembangan

ekosistem digital mendorong pengelolaan arsip berjalan secara lebih efektif dan efisien melalui peningkatan pengelolaan arsip secara digital. Adapun komponen yang menjadi pengukuran tingkat digitalisasi arsip adalah penerapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang meliputi proses bisnis dan jumlah penggunaan serta sumber daya pendukung berupa infrastruktur dan helpdesk.

Nilai tingkat digitalisasi arsip didapatkan melalui hasil Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) yang dikeluarkan oleh ANRI pada akhir tahun. Adapun indikator penilaian dalam APAE tersebut antara lain digitalisasi arsip, implementasi Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), sumberdaya Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), serta jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN).

Tabel 4. Target dan realisasi IKU Tingkat Digitalisasi Arsip KKP

IKU Tingkat Digitalisasi Arsip KKP												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	87,62	81	88,69	109,49	1,07	81	109,49	85	103,87

Berdasarkan periode pengukurannya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Digitalisasi Arsip KKP diukur secara tahunan. Adapun capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, dengan capaian akhir sebesar 88,69. Beberapa capaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Alih Media Arsip Bekerja Sama dengan ANRI dengan hasil alih media arsip sebanyak 2100 lembar
2. Pengelolaan SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)/JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)
3. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)

4. Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan melalui aplikasi Portal KKP

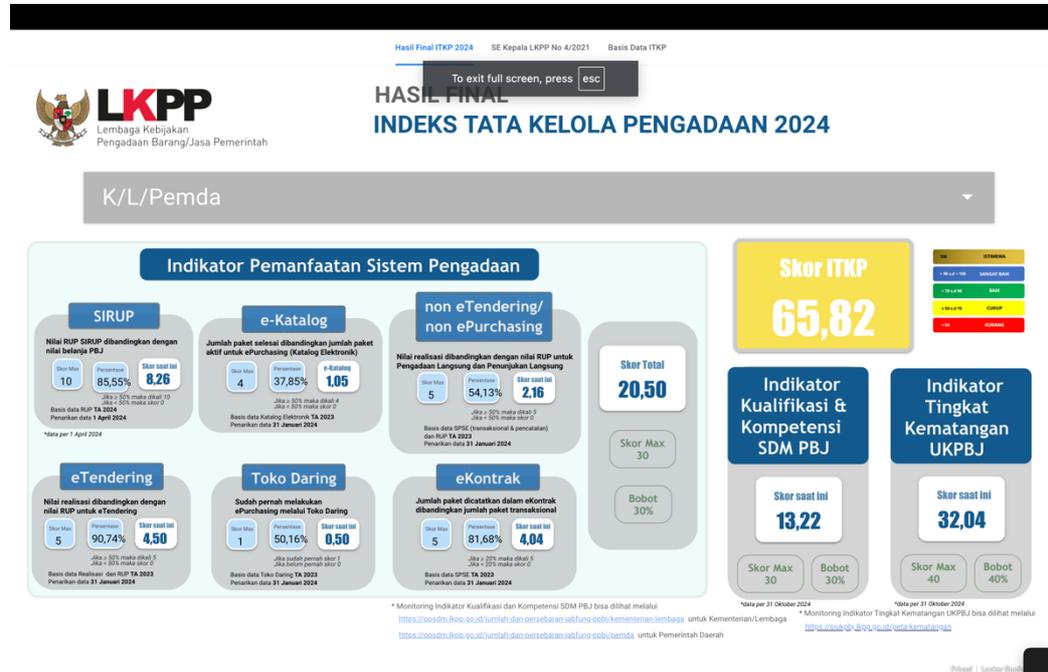
2) Indeks Tata Kelola Pengadaan (indeks)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (indeks) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit kerja terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengukuran IKU ini, terdapat formula penilaian antara lain Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%) + Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%) + Tingkat Kematangan UKPBJ (40%).

Tabel 5. Target dan realisasi IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan

IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023- 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	86,44	80	85,10	106,38	-	80	106,38	85	101,20

IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan (indeks) merupakan IKU baru dan bersifat tahunan dengan capaian tahun 2024 sebesar 85,10 (106,38%). Capaian ini lebih besar dari rata-rata capaian K/L/P/D sebesar 65,82.



Gambar 2. Capaian ITKP Nasional

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian nilai ITKP KKP adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan usulan penggunaan produk impor lingkup KKP
2. Raker Pokja Pemantauan Tim Nasional P3DN
3. Pelatihan & Sertifikasi PBJ Level I
4. Uji Kompetensi Pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari Jabatan lain
5. FGD PBJ
6. Penjenjangan JF PPBJ Ahli Pertama
7. Pemutakhiran data dukung Kematangan UKPBJ (Penyiapan data dukung Pusat Keunggulan PBJ Proaktif)
8. Pelatihan dan sertifikasi PPK Tipe B
9. Monitoring Realisasi Capaian PBJ satker lingkup KKP terkait Pemanfaatan Sistem Pengadaan

3) Nilai realisasi paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diumumkan dalam RUP (e-tendering)

Proses pelaksanaan pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa, tender, kontrak dan serah terima. Perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Satker kemudian diusulkan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk selanjutnya direview dan dilaksanakan tender. Hasil review tersebut dapat berupa konsolidasi pengadaan atau pembatalan paket pengadaan. IKU ini mengukur perbandingan antara jumlah realisasi pagu paket yang dilakukan tender di aplikasi SPSE dibandingkan pagu pengadaan e-Tendering yang diumumkan dalam aplikasi SiRUP.

Untuk memperoleh nilai realisasi paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diumumkan dalam RUP (e-tendering) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pagu paket yang dilakukan tender di SPSE}}{\sum \text{Pagu paket yang diumumkan di SiRUP}} \times 100\%$$

Tabel 6. Target dan realisasi IKU Nilai realisasi paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diumumkan dalam RUP

IKU Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender dibandingkan Total Pagu paket yang diumumkan dalam RUP (e-tendering)												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	5	5	5	100	0	5	100	5	100

Tabel 6 menggambarkan realisasi IKU realisasi paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diumumkan dalam RUP (e-tendering). Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU bersifat tahunan dengan capaian tahun 2024 sebesar 5 (100%). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian target IKU secara optimal adalah Koordinasi dengan Satker agar paket yang telah diumumkan dalam RUP segera diusulkan kepada UKPBJ KKP dan apabila terdapat perubahan dapat disesuaikan. Capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan capaian K/L/P/D tahun 2024 sebesar 4,5.



Gambar 3. Capaian e-Tendering Nasional

4) Persentase pelaksanaan layanan pimpinan

Persentase pelaksanaan layanan pimpinan adalah seluruh kegiatan penatausahaan dan kerumahtanggan Menteri, Sekjen, SAB, SK & PM yang telah terfasilitasi. Persentase pelaksanaan ketatausahaan Menteri, Sekjen, SAB & SKM sesuai ketentuan bisa didapat dengan menggunakan metode kuisioner dengan koresponden meliputi Menteri, Sekjen, SAB, SK & PM.

Persentase pelaksanaan layanan pimpinan didapat dari survei indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan pimpinan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan baik di kantor pusat maupun saat kunjungan ke daerah yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal KKP. Responden survei berasal dari

pegawai Unit Kerja Eselon I baik di pusat maupun di daerah/UPT di lingkup KKP. Survei ini dilakukan menggunakan pedoman survei dari Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk penyusunan dan penilaian hasil survei menggunakan dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Nilai Indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan layanan kerumahtanggan terhadap 7 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{7} = 0,14$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 7. Persentase pelaksanaan layanan pimpinan

IKU Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023- 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	88,73	88	92,87	105,53	4,14	88	105	-	-

IKU presentase pelaksanaan layanan pimpinan merupakan IKU yang diukur secara tahunan dengan capaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 92,87 (105,53%). Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam menunjang IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan dikantor (Penerimaan tamu dan tamu asing serta rapat pimpinan/audiensi)
2. Pelayanan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan diluar kantor
3. Pelayanan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan kunjungan kerja dalam negeri
4. Pelayanan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan kunjungan kerja luar negeri
5. Penatausahaan naskah dinas pimpinan
6. Pelaksanaan perawatan rumah dinas jabatan Menteri

5) Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan kantor pusat

Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan adalah representasi tingkat kepuasan pengguna gedung kantor pusat KKP terhadap pelayanan kerumahtanggan (kebersihan, pemeliharaan bangunan gedung dan keamanan) yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, KKP. Responden survei berasal dari pegawai Unit Kerja Eselon I yang berkantor di gedung kantor pusat KKP. Penyusunan dan penilaian hasil survei dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan layanan kerumahtanggaan terhadap 25 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memperoleh nilai Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{25} = 0,04$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Tabel 8. Target dan realisasi IKU Indeks kepuasan terhadap layanan kerumah tanggaan

IKU Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggaan												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	88,83	85	93,62	110,14	4,79	85	110,14	-	-

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa IKU indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan merupakan IKU tahunan dengan capaian pada Tahun 2024 adalah 93,62 (110,14%). Penilaian tersebut didapatkan dari 163 Responden. Adapun hal-hal yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti pekerjaan renovasi ruang kerja lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
2. Melakukan evaluasi penggunaan BMN lingkup Biro Umum dan PBJ
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kebersihan, keamanan, kesehatan dan bus jemputan sexara berkala

6) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Umum dan PBJ

IKU ini merupakan presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit sampai dengan tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Biro Umum dan PBJ. Adapun nilai realisasi IKU yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Biro Umum dan PBJ selama periode pengukuran.

Tabel 9. Target dan realisasi IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Biro Umum dan PBJ

IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Biro Umum dan PBJ												
Realisasi 2018-2022					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kepsekjen 11/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2023	Target 2025	% Capaian thd Target 2024
-	-	100	100	100	80	100	120%	-	80	120%	85	120 %

Pada tahun 2024, IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Biro Umum dan PBJ memiliki realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80%. Adapun

upaya yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Jenderal, antara lain terkait Pelaksanaan Anggaran dan PBJ dan persiapan renovasi ruang kerja lingkup Sekretariat Jenderal. Capaian ini memiliki nilai yang sama dengan capaian unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal KKP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
SETJEN		196	196	120.551.753	120.551.753	100%	0

7) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (persen)

Nilai temuan atas laporan keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 8. Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan PBJ

IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2023 Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa belum memiliki realisasi pada Tahun 2024. Biro Umum dan PBJ terus berupaya menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan BPK terkait hasil temuan pada Biro Umum dan PBJ. Capaian yang didapatkan pada tahun 2024 ini memiliki nilai yang sama dengan unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal KKP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Eselon II	Jumah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
SETJEN		17	17	100,00

8) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan

strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai SAKIP KKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

Tabel 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ

IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	80,30	84	85,80	102,14	5,5	84	102,14	87	98,62

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ pada tahun 2024 adalah sebesar 85,80 (102,14). Dalam rangka menunjang nilai IKU ini, kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Umum dan PBJ adalah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan pada Lembar Kerja Evaluasi Sakip.

9) Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah peta tingkat profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat bagi pegawai ASN, instansi pemerintah dan masyarakat.

Pengukuran IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu kualifikasi (tingkat pendidikan), Kompetensi (diklatpim, diklat teknis/fungsional, diklat 20 JP dan seminar), kinerja (nilai PPKP/SKP) dan disiplin (penjatuhan hukuman disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN tersebut, selanjutnya dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah

Tabel 10. Target dan realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

IKU Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	86,87	80	87,83	103,33	0,96	85	103,33%	87	100,95

Pengolahan hasil penilaian IKU dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi secara tahunan melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Nilai IP ASN dapat ditingkatkan dengan mengikuti Diklat 20 JP, seminar, diklat fungsional dan diklatpim. Indikator ini diukur dengan periode tahunan sehingga pada tahun 2024 belum memiliki realisasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Umum dan PBJ antara lain

1. Monitoring capaian IP ASN Biro Umum dan PBJ Tahun 2024
2. Pembahasan capaian IP ASN Biro Umum dan PBJ pada Rapat Pimpinan Lingkup Biro Umum dan PBJ

Adapun capaian IP ASN di Lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	Total	21,85	33,06	27,14	5	87,05 (Tinggi)

10) Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan data dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pencapaian hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data dan informasi juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga dapat disusun arah dan program pembangunan yang optimal, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Umum dan PBJ dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Target dan realisasi IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Umum dan PBJ

IKU Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	-	-	-	133,33	92	133,33	120%	-	94	120%	-	-

Tabel 11 menunjukkan bahwa indikator unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Umum dan PBJ memiliki realisasi sebesar 133,33 dari target sebesar 92 pada tahun 2024 (120%). Hal ini didukung oleh keaktifan Kepala Biro dalam memberikan informasi dalam *portal.kkp.go.id*. Adapun perbandingan capaian Biro Umum dan PBJ dengan Unit Eselon II lain dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Eselon II	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	94,00	133,33	141,84
3.	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	94,00	100,00	106,38
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8.	LPMUKP	94,00	133,33	141,84
Sekretariat Jenderal		94,00	125,00	132,98

11) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian ini diperoleh dari Indikator Pelaksanaan Anggaran berdasarkan aplikasi Om Span. Nilai kinerja anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Target dan realisasi IKU indikator pelaksanaan kinerja anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran													
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	
-	-	-	-	90,94	93,76	90,99	97,05	-	93,76	97,05%	92	98,90	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU indikator pelaksanaan kinerja anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2024 mendapat nilai capaian sebesar 90,99 (97,05%). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian IKPA level Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar 93,84.

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	82.45	91.68	96.67	99.18	96.79	97.66	94.34	100%	0.50	93.84
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	12.37	18.34	9.67	9.92	9.68	24.41				
			Nilai Aspek	91.03		96.08				97.66				

Adapun penyebab IKU ini tidak tercapai adalah karena rendahnya nilai pada unsur Deviasi Halaman III DIPA. Adapun rencana perbaikan yang akan dilaksanakan Biro Umum dan PBJ pada antara lain:

1. Mengusulkan revisi anggaran dalam hal pemutakhiran halaman III DIPA
2. Penginputan capaian output

12) Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. Untuk variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian RO, capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Tabel 15. Target dan realisasi IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa													
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Permen KP 57/2020)				
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	
-	-	-	-	-	71	86,18	120	-	82	-	71,50	120	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan PBJ pada Tahun 2024 adalah sebesar 86,18 (120 %). Capaian ini memiliki nilai yang lebih rendah dibanding capaian level Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 87,18. Dalam rangka menunjang nilai IKU ini, kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Umum dan PBJ adalah monitoring dan evaluasi ketercapaian kinerja dan output dari anggaran Biro Umum dan PBJ, khususnya pada RO yang memiliki Standar Biaya.

D. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Ketercapaian target kinerja pada Tahun 2024 tidak lepas dari tindaklanjut rekomendasi pada Triwulan III Tahun 2024. Adapun rincian tindaklanjut rekomendasi Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

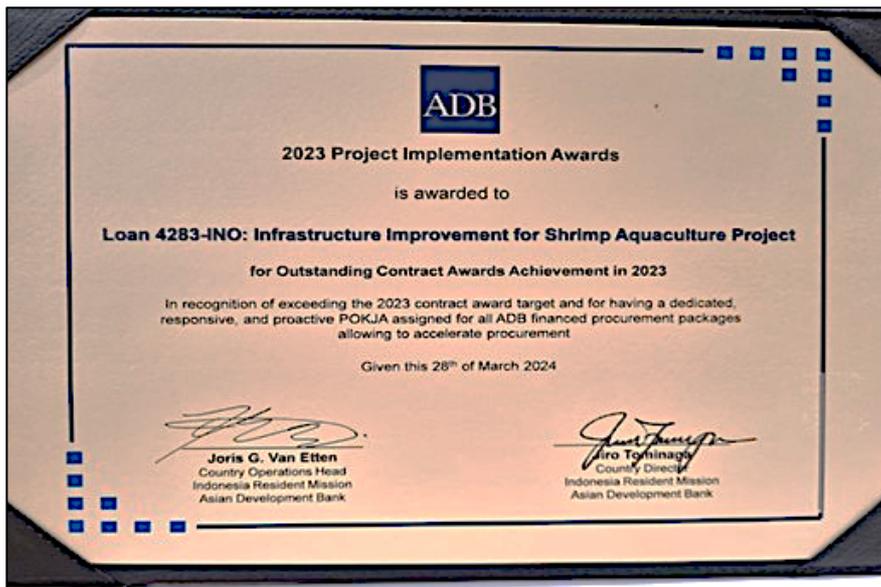
NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Melakukan evaluasi dan monitoring capaian IKPA dan NKA Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ	a. Pengisian matriks Rencana Penarikan Dana Triwulan IV Tahun 2024 b. Pengusulan Revisi Anggaran dalam Hal Pemutakhiran Halaman III DIPA c. Monitoring RO yang menggunakan Standar Biaya

BAB IV PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh penghargaan dari ANRI sebagai Peringkat IX Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dengan kategori AA "Sangat Memuaskan". Penghargaan ini diberikan oleh ANRI kepada lembaga yang memiliki prestasi dalam pengelolaan arsip.



2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KKP mendapatkan penghargaan dari Asian Development Bank untuk *Outstanding Contract Awards Achievement in 2023*



3. Klinik Pratama KKP mendapatkan Hasil Akreditasi dan dinyatakan lulus secara “Paripurna”



BAB V PENUTUP

Pada Tahun 2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Dari 12 Indikator tersebut, capaian kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebesar 107,37 dengan kategori Baik. Adapun 1 (satu) indikator yang tidak tercapai adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan PBJ.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan ketercapaian target kinerja Biro Umum dan PBJ pada tahun 2024, rencana tindaklanjut yang perlu diupayakan pada Tahun 2025 antara lain melakukan evaluasi dan monitoring capaian IKPA Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ, khususnya pada unsur Deviasi Halaman III DIPA.

LAMPIRAN

a. Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 (Januari)

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)	81
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan KKP (Indeks)	80
		3	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (Nilai)	5
		4	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan (persen)	88
		5	Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat (persen)	85
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ (Nilai)	84
		9	IP ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	85
		10	Persentase Unit Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	82

b. Perjanjian Kinerja Biro Umum dan PBJ Tahun 2024 (Oktober)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)	81
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks)	80
		3	Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP (Nilai)	5
		4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (persen)	88
		5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat (persen)	85
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	80
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
		8	Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	84
		9	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	85
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	94
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	71